

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Sambutan Kota Samarinda

Adella utri Rahmadani¹, Jauchar. B², Melati Dama³

¹²³Universitas Mulawarman

Email: adellaptri11@gmail.com

Submit	: 06-04-2026	Accepted	: 12-07-2026
Review	: 09-05-2026	Published	: 30-08-2026

Abstrak

Artikel ini membahas tentang efektivitas implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda, dengan berfokus pada aspek ketepatan waktu, ketepatan sasaran, kualitas, kuantitas, dan kegunaan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Kelurahan Sambutan telah berjalan efektif. Berdasarkan kelima aspek tersebut ketepatan waktu, ketepatan sasaran, kualitas, kuantitas, dan kegunaan tiga di antaranya telah tercapai. Sementara itu, aspek ketepatan waktu dan ketepatan sasaran belum tercapai.

Kata Kunci : Efektivitas, BPNT Program

Abstract

This article discusses the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Sambutan Village, Samarinda City, focusing on aspects such as timeliness, targeting, quality, quantity, and usefulness. This research was conducted in Sambutan Village, Samarinda City. The type of research is qualitative descriptive. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods from Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. The results of the study show that the implementation of the BPNT program in Sambutan Village has been effective. Based on five aspects: timeliness, targeting, quality, quantity, and usefulness, three of them have been achieved. Meanwhile, the aspects of timeliness and targeting have not been achieved.

Keywords: Effectiveness, BPNT Program

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan situasi yang dialami oleh individu maupun kelompok masyarakat dimana mereka tidak mampu mencukupi keperluan dasar hidupnya sehari-hari. Keperluan sehari-hari meliputi sandang, pangan, dan papan. Daryono dalam (Fitri Aningsih Elia dan Yahya Nusa, 2021: 18) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta hal lain yang berhubungan dengan nilai kehidupan. Berdasarkan pendapat Daryono bahwasanya yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah salah satunya berkaitan dengan ketercukupan pangan. Banyak hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, mulai dari pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, hingga menyediakan bantuan sosial tunai maupun non tunai, antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program transformasi dari program Rastha. Program BPNT ini merupakan program bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp. 200.000/bulan yang tidak dapat diuangkan melainkan harus digunakan untuk membeli bahan pangan (beras & telur) di e-warung. Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan program BPNT. Sebagai pilot project, terdapat 4 Kabupaten/Kota yaitu Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Samarinda yang meliputi seluruh Kelurahannya. Salah satunya adalah Kelurahan Sambutan. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 30,50 km², populasinya sebanyak 6.170 KK, dan jumlah masyarakat miskin sebanyak 352 KK.

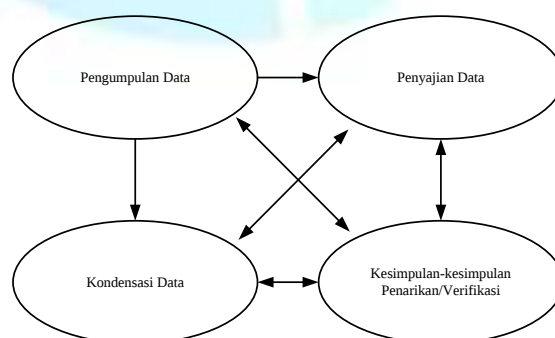
Berdasarkan data penerima manfaat BPNT tahun 2023, bantuan ini diberikan kepada 120 KPM yang tersebar di 40 RT. Selama pelaksanaannya hingga saat ini, terdapat 1 e-warung yang beroperasi sebagai tempat distribusi bantuan pangan. Mengacu pada pedoman umum BPNT, bantuan ini diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terbawah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), selanjutnya disebut KPM yang namanya termasuk dalam DTKS sebagai masyarakat prasejahtera dan ditetapkan oleh Kemensos, warga miskin/tergolong rentan miskin dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta bukan Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI. Ada beberapa hal kepesertaan penerima manfaat dalam program BPNT dapat berganti apabila: meninggal dan beranggota tunggal, KPM yang pindah domisili, KPM yang menolak/mengundurkan diri sebagai KPM, KPM yang tercatat ganda/lebih, maka kepesertaan KPM-nya dapat diberhentikan dan dialihkan ke masyarakat yang lebih berhak.

Berdasarkan observasi, pelaksanaan BPNT di Kelurahan Sambutan masih ditemukan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran dan ketepatan waktunya. Pergantian KPM jarang dilakukan, sehingga peserta BPNT juga tidak mengalami perubahan, sementara kondisi perekonomian KPM pasti mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dikarenakan tidak adanya pembaruan data, ditemukan pula 2 KPM yang statusnya sudah

meninggal dunia masih terdata sebagai penerima BPNT dan tidak ada tindak lanjut mengenai hal tersebut. Selain itu, bantuan yang seharusnya diberikan rutin setiap bulan dalam pelaksanaannya pernah mengalami keterlambatan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Sambutan. Program bantuan sosial, agar benar-benar bermanfaat sejatinya harus sampai kepada sasaran yang tepat dan di waktu yang rutin, karena ketepatan sasaran dan ketepatan waktu merupakan suatu tolak ukur berhasilnya suatu program. Penelitian ini penting dilakukan karena program BPNT merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin dan pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 5 tahun sehingga perlu dikaji lebih mendalam terkait pelaksanaannya dan capaiannya serta faktor yang menghambat keberhasilan program tersebut.

2. Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data tidak melibatkan angka/statistik melainkan berupa deskripsi untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, berdasarkan pedoman umum BPNT Tahun 2019 efektivitas pelaksanaan program BPNT ditinjau dari: Aspek tepat waktu, Aspek tepat sasaran, Aspek tepat kualitas bantuan, Aspek tepat jumlah bantuan, Aspek tepa guna. *Kedua*, faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan program BPNT. Untuk sumbu data dalam penelitian ini ini dibagi menjadi tiga kategori (Arikunto, 2013: 172-173) : (1) *Person* : Data diperoleh dari wawancara dengan individu menggunakan purposive sampling. Informan antara lain; Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan, pemilik e-warung Kelurahan Sambutan, dan Keluarga Penerima Manfaat, (2) *Place* : Data berasal dari observasi lokasi di Kelurahan Sambutan, (3) *Paper* : Data berasal dari dokumen tertulis seperti jurnal, perundang-undangan, data KPM di Kelurahan Sambutan, DTKS Sambutan, dan dokumentasi tempat tinggal maupun sembako. Teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif yang dinyatakan oleh Miles and Huberman sebagai berikut:



Gambar 1. Model Interaktif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Aspek Tepat Waktu

Aspek tepat waktu merupakan aspek yang berhubungan dengan ketepatan waktu pendistribusian bantuan dari pemerintah kepada target penerima BPNT. Tolak ukur aspek ini adalah apabila antara waktu penyaluran yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah dengan pelaksanaan di lapangan sesuai maka dapat dikatakan efektif begitu pula sebaliknya. Penyaluran bahan pangan sudah seharusnya diberikan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran bansos dapat dikatakan berjalan efektif.

Berdasarkan data penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2023 penyaluran dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum rutin dilakukan setiap bulan. Dalam pelaksanaannya penyaluran masih mengalami keterlambatan satu kali dan juga waktu penyaluran yang tidak menentu/tidak tetap. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. Jadwal Penyaluran Dana BPNT 2023.

Tabel 1.
Jadwal Penyaluran Dana BPNT 2023

No	Tahap Penyaluran	Jadwal Penyaluran
1.	Tahap 1	5 – Feb – 2023
2.	Tahap 2	25 – Feb – 2023
3.	Tahap 3	25 – Mar – 2023
4.	Tahap 4	25 – Apr – 2023
5.	Tahap 5	25 – Mei – 2023
6.	Tahap 6	24 – Jun – 2023
7.	Tahap 7	24 – Jul – 2023
8.	Tahap 8	25 – Agt – 2023
9.	Tahap 9	25 – Sept – 2023
10.	Tahap 10	24 – Okt – 2023
11.	Tahap 11	20 – Nov – 2023
12.	Tahap 12	20 – Des – 2023

Berdasarkan pedoman umum BPNT penyaluran dana BPNT disalurkan rutin setiap bulan ke rekening KPM. Namun, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa penyaluran dana BPNT pernah mengalami keterlambatan dan juga waktu yang tidak menentu. Artinya aspek tepat waktu belum terlaksana secara efektif karena antara yang tertulis di pedoman BPNT dengan pelaksanaan yang ada di lapangan belum sesuai.

3.2. Aspek Tepat Sasaran

Aspek tepat sasaran merupakan aspek yang membahas kesesuaian antara kriteria calon penerima BPNT yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator dengan data masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima BPNT. Aspek ini menjelaskan terkait kondisi masyarakat tidak mampu yang layak menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, pihak Kelurahan Sambutan mendata masyarakat yang masuk kategori tidak mampu agar dipertimbangkan mendapat bantuan dari pemerintah. Masyarakat

tidak mampu yang di data oleh Kelurahan bertujuan agar terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apabila sudah terdaftar dalam DTKS maka selanjutnya pihak Kementerian Sosial yang berhak menentukan penerimanya, dari proses tersebut terjaring sebanyak 120 Kepala Keluarga (KK) yang disetujui menjadi KPM BPNT yang sesuai dengan persyaratan yaitu mereka dengan kondisi perekonomian 25% terbawah di DTKS.

Kondisi masyarakat tidak mampu yang terdata sebagai KPM, data yang diperoleh di lapangan dari total 120 KPM sebanyak 92 KPM yang menerima BPNT merupakan keluarga yang memiliki penghasilan harian dan bulanan tidak lebih dari Rp. 600.000. Mereka merupakan keluarga-keluarga yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan harian, yang berarti penghasilannya tidak menentu. Tempat tinggal yang ditempati bersifat semi permanen. Adapun pekerjaannya antara lain seperti pedagang kaki lima, pedagang warung rumahan, buruh tani, buruh kebun, IRT yang berstatus janda karena suaminya meninggal dunia dan usianya sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, buruh harian lepas, dan wiraswasta. Penerima BPNT yang disebutkan tadi adalah keluarga yang ekonominya 25% terbawah dalam DTKS sehingga mereka terdata sebagai penerima BPNT. Kemudian sebanyak 28 KPM merupakan keluarga yang memiliki penghasilan bulanan lebih dari Rp. 600.000. Adapun yang menjadi pertimbangan mereka turut menjadi penerima BPNT, karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, seperti tanggungan anak sekolah.

Selain itu, berdasarkan data di lapangan bahwa dari segi administrasi atau pendataan masih belum baik karena ditemukan data 2 KPM yang statusnya sudah meninggal dunia masih terdata sebagai penerima BPNT, artinya dengan adanya hal tersebut menunjukkan tidak adanya pembaruan data oleh pihak Kelurahan Sambutan. Jadi, pelaksanaan program BPNT dalam aspek tepat sasaran belum efektif karena dari segi administrasi atau pendataan ditemukan KPM yang statusnya sudah meninggal dunia masih terdata sebagai penerima BPNT, padahal berdasarkan pedoman hal tersebut harus ditindaklanjuti, diganti dengan warga yang lain yang lebih berhak, walaupun hasil dari penelitian menunjukkan kondisi penerima BPNT sudah sesuai dengan pedoman BPNT yaitu mereka dengan perekonomian 25% terbawah dalam DTKS, akan tetapi karena masih ditemukan data KPM yang meninggal dan tidak ada tindaklanjutnya jadi pelaksanaan BPNT dalam aspek tepat sasaran belum sepenuhnya efektif.

3.3. Aspek Tepat Kualitas Bantuan

Aspek tepat kualitas merupakan aspek yang mencakup kualitas bahan pangan (sembako) yang dijual dan disediakan oleh pihak e-warung dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi oleh KPM. Tolak ukur yang digunakan dalam aspek ini adalah antara merk/kualitas barang yang dijanjikan oleh pemerintah harus sesuai dengan merk/kualitas barang yang diterima oleh KPM dari toko penyalur. Apabila sudah sesuai maka aspek ini dapat dikatakan terlaksana dengan efektif, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan pedoman umum BPNT disebutkan bahwa jenis barang yang dapat ditukarkan menggunakan dana BPNT adalah beras dan/ atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-warung. Adapun beras

yang disalurkan dalam program BPNT ini adalah beras dengan kualitas medium yang berasal dari bulog. Kemudian pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan aturan di pedoman BPNT terkait sembako yang wajib diterima adalah beras dan/atau telur. Beras yang disalurkan merupakan beras bulog, walaupun beras bulog tetapi kualitasnya baik, berasnya tidak berketu, bersih, kemudian ketika dimasak juga rasanya enak dan pulen, Kemudian dari data di lapangan kualitas berasnya masih layak juga dikonsumsi untuk KPM yang sudah lanjut usia. Sementara untuk telur karena tidak ada merk yang pasti, maka pihak e-warung biasanya menyediakan yang ukurannya standar agar sesuai dengan budget dana KPM.

3.4. Aspek Tepat Jumlah Bantuan

Aspek tepat jumlah merupakan aspek yang digunakan untuk melihat nilai bahan pangan (sembako) yang diterima oleh penerima manfaat dengan jumlah dana bantuan sesuai nilainya. Tepat jumlah dalam penyaluran bantuan sosial diperlukan kesesuaian jumlah bahan pangan yang telah ditentukan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga kebutuhan di masyarakat dapat terpenuhi. Tolak ukur dalam aspek ini dikatakan efektif apabila bahan pangan yang ditukarkan di e-warung oleh penerima manfaat nilainya/jumlahnya senilai dengan jumlah saldo uang tunai yang ada di rekening penerima manfaat. Sebaliknya, jika tidak sesuai maka efektivitas program BPNT ditinjau dari aspek tepat jumlah bantuan belum terlaksana secara efektif.

Berdasarkan pada pedoman BPNT setiap KPM menerima dana bantuan sebesar Rp. 200.000/bulan. Dana bantuan tersebut tidak dapat diambil dalam bentuk uang/diuangkan. Untuk dapat menerima bantuan, KPM harus pergi ke e-warung yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dalam rangka membelanjakan dana bantuan yang ada di rekening masing-masing. Jadi, bantuan ini hanya dapat diambil oleh KPM dalam bentuk sembako/bantuan pangan. Adapun sembako/bantuan pangan yang dibeli adalah beras 10 kg dan telur 1 piring dengan tambahan 5 butir telur yang harga satuannya Rp. 2000.00

Berdasarkan data harga sembako yang ada di pasaran, kisaran yang didapatkan oleh KPM untuk 10 kg beras dan telur 1 piring ditambah telur 5 butir jika diuangkan maka senilai dengan uang Rp. 200.000, yang mana merupakan nominal dana bantuan BPNT yang disalurkan di rekening masing-masing KPM. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. Harga Pasar Sembako BPNT.

Tabel 2.
Harga Pasar Sembako BPNT

No.	Bahan Pangan	Jumlah	Harga
1.	Beras Bulog	5 Kg	Rp. 65.000.00
2.	Telur ayam (Standar)	1 piring	Rp. 60.000.00

Jadi, dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT dalam aspek tepat jumlah bantuan telah efektif.

3.5. Aspek Tepat Guna

Aspek tepat guna merupakan aspek yang membahas tentang kebermanfaatan yang dirasakan oleh KPM terkait adanya program BPNT. Dikarenakan program BPNT ini sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin yang terdapat pada setiap kelurahan, maka seharusnya masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dibantu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Tolak ukur aspek tepat guna apabila tujuan dari program BPNT yaitu meringankan beban pengeluaran KPM dan menjaga/menyeimbangkan gizi KPM dapat tercapai. Hasil penelitian menyatakan bahwa 10 kg beras dan telur 1 piring ditambah 5 butir telur, mampu bertahan atau memenuhi kebutuhan konsumsi KPM selama 2 minggu. Berdasarkan data yang diperoleh dari artikel online detikfinance.com bahwa konsumsi beras per-orang di Indonesia sebanyak 75 kg/tahun. Jika dihitung selama sebulan, artinya setiap 1 orang mengkonsumsi beras sebanyak 6,25 kg/bulan. Lalu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi beras dalam setahun untuk satu keluarga beranggotakan 4 orang sebanyak 300 kg/tahun. Jika dihitung selama sebulan, artinya untuk satu keluarga beranggotakan 4 orang mengkonsumsi beras sebanyak 25 kg/bulan. Adanya bantuan 10 kg beras setidaknya sudah mampu menutupi setengah kebutuhan mereka.

Seperti yang kita ketahui beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras merupakan makanan sumber energi yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi namun proteinnya rendah, untuk menyeimbangkannya maka didampingi dengan telur sebagai penyeimbang asupan protein. Oleh karena itu, aturan yang dibuat pemerintah terkait pemilihan komoditas beras dan telur dalam program BPNT ini sangat bermanfaat bagi KPM karena tujuan dari pelaksanaan program BPNT sendiri salah satunya adalah untuk menjaga kecukupan gizi KPM, dari sisi asupan karbohidrat berasal dari beras dan dari asupan protein berasal dari telur. Berdasarkan data yang diperoleh efektivitas pelaksanaan program BPNT dalam aspek tepat guna telah tercapai. Penilaian KPM terhadap program BPNT ini dapat membantu rata-rata belanja kebutuhan pokok harian selama 2 minggu, dengan demikian BPNT mampu mengurangi beban pengeluaran dan menjaga kebutuhan gizi KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

3.6. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Sambutan

Sebelumnya, dalam pembahasan telah dijabarkan mengenai pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Sambutan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bahwa program BPNT di Kelurahan Sambutan di beberapa aspek belum efektif. Penyebabnya tidak terlepas dari faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya. Pertama, keterlambatan waktu terjadi karena dana dari kas negara lambat di transfer ke rekening Kemensos setelah itu sempat terjadi gangguan sistem di bank penyalur saat ingin melakukan pemindah bukuan dari rekening Kemensos ke rekening KPM. Oleh karena itu, terjadi keterlambatan di bulan Januari. Kedua, pendataan yang kurang maksimal terjadi karena keterbatasan personil Kelurahan di bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang hanya terdiri dari 3 orang dan tidak sebanding dengan banyaknya

tupoksi Bidang Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga mereka merasa kewalahan, selain itu minimnya laporan dari RT dalam mengusulkan warganya yang tidak mampu juga menjadi kendala tersendiri dalam memperbarui data.

4. Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sambutan Kota Samarinda: *Pertama*, Aspek tepat waktu dalam penyaluran dana BPNT di Kelurahan Sambutan belum terlaksana dengan efektif, karena tanggal penyaluran setiap bulannya yang tidak menentu dan juga pernah mengalami keterlambatan satu kali di bulan Januari. *Kedua*, Aspek tepat sasaran dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Sambutan belum sepenuhnya efektif karena dalam pendataannya ada 2 KPM yang statusnya sudah meninggal dunia namun masih menjadi penerima aktif.. *Ketiga*, Aspek tepat kualitas dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Sambutan sudah efektif karena beras maupun telur yang diterima KPM semuanya dalam kondisi yang bagus dan layak dikonsumsi. *Keempat*, Aspek tepat jumlah bantuan dalam pelaksanaan program BPNT sudah memenuhi kriteria tepat jumlah. Dikategorikan tepat jumlah karena bahan sembako yang ditukarkan di e-warung nilainya setara dengan uang yang ada di rekening anggota KPM. Saat anggota KPM ingin menukarkan dengan bahan pangan, selalu menyesuaikan dengan limit uang yang ada di rekening masing-masing sehingga bantuannya pun tidak akan lebih dari jumlah saldo dan tidak ada dikenakan tambahan biaya apapun. Berdasarkan tracking harga pasaran sembako totalannya sesuai dengan uang yang ada di rekening. *Kelima*, Aspek tepat guna dalam pelaksanaan program BPNT sudah memenuhi kriteria tepat guna. Dikategorikan tepat guna karena masyarakat yang menerima bantuan merasa terbantu hanya saja untuk beras 10 kg cukup sampai 2 mingguan namun tetap membantu meringankan beban pengeluaran KPM karena setengah dari pengeluaran membeli beras sudah terpenuhi dari BPNT. Efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Sambutan telah dianalisis dalam lima aspek, yaitu aspek tepat waktu, aspek tepat sasaran, aspek kualitas bantuan, tepat jumlah bantuan, dan tepat guna. Berdasarkan kelima aspek, tiga diantaranya telah tercapai. Dengan demikian dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Sambutan telah terlaksana dengan efektif.

Daftar Pustaka

Journal Articles

- Cicilia, V. dkk. (2015). Analisis Efisiensi & Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(2). <https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015>
- Daud, M., & Marini, Y. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51>
- Elia, F. Aningsih dan Yahya Nusa. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 15–42. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/152>

- Hastirani, H. dkk. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 78–83. <https://doi.org/10.51817/jia.v9i2.475>
- Husain, L. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kearsipan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 2(1), 47–52. <https://ojs.unm.ac.id/administrare/article/view/1235>
- Juliani, R. dkk. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Dulupi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3373–3382.
- Lestari, R. P., & Murti. (2015). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01), 195–201. <https://core.ac.uk/download/pdf/229335559.pdf>
- Najidah, N & Hesti Lestari. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23514>

Books

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik* (15th ed.). Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan Kelembagaan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015
- Pasolong, H. *Teori Administrasi Publik* (9th ed.). Bandung: CV. Alfabeta. 2019

Book by an Institutional or Organizational Author

- Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako
- Data Monografi Kelurahan Sambutan Tahun 2023
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Tahun 2023
- Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Kelurahan Sambutan Tahun 2023